



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DPPKBP3A
KABUPATEN
BANYUMAS

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,59%	1,03 %	65,01	Tidak tercapai
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,193%	0,03%	176,67	Tercapai
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,5	69,77	95,77	Tidak tercapai
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	610	601	98,52	Tidak tercapai

Kemudian Capaian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Keterangan (%)
DINAS		28.890.846.712	27.133.044.339	93,92
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	610.990.500	560.567.500	91,74
2.	Program Perlindungan Perempuan	256.940.000	247.001.983	96,64
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	57.501.000	57.313.500	96,13
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	4.087.500	4.087.500	100
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	263.747.500	257.399.768	97,59
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	185.750.000	180.998.000	97,44
7.	Program Pengendalian Penduduk	540.050.750	474.341.708	87,83
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.239.800.000	8.362.322.680	90,50
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.347.021.000	9.305.736.000	99,55
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	8.384.958.462	7.683.275.700	91,63
UPTD		99.020.001	98.253.500	99,22
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	30.000.001	29.629.500	98,76
2	Program Perlindungan Khusus Anak	69.020.000	68.624.000	99,42
Jumlah		28.989.866.713,00	27.231.297.839	93,93

Demikian LKjIP ini Kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Purwokerto, 31 Desember 2025

KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS



KRISianto, A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740321 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN 2

 C. SUSUNAN ORGANISASI 4

 D. SUMBER DAYA APARATUR 6

 E. ISU STRATEGIS 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

 A. RENCANA STRATEGIS 9

 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 12

 C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 16

 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 17

 C. REALISASI ANGGARAN 48

 D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN. 48

 E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN..... 51

BAB IV PENUTUP 52

 A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA..... 52

 B. PROGRES CAPAIAN ISU-ISU STRATEGIS 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai (PNS/CPNS) Berdasarkan Golongan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025 6

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025 6

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas 11

Tabel 2.2 Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025 13

Tabel 2.3 Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025..... 14

Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Indikator Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025 17

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025 18

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 sampai dengan 2025 18

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 19

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga).. . 19

Tabel 3.6 Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025 21

Tabel 3.7 Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan: Terkendalinya Jumlah Penduduk Tahun 2025... 22

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025 23

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 sampai dengan 2025 24

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan Target Renstra..... 25

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga) 26

Tabel 3.12 Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025 29

Tabel 3.13 Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan: *Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak* Tahun 2025 30

Tabel 3.14 Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Sasaran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025..... 32

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 sampai dengan 2025 32

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan Target Renstra..... 33

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga)..... 33

Tabel 3.18 Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025 35

Tabel 3.19 Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran: Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025 35

Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025..... 36

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 sampai dengan 2025 37

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan Target Renstra..... 38

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga) 38

Tabel 3.24 Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025 40

Tabel 3.25 Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan* Tahun 2025 41

Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025..... 42

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 sampai dengan 2025 43

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan Target Renstra..... 43

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga) 44

Tabel 3.30 Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025 46

Tabel 3.31 Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran: *Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak* Tahun 2025..... 47

Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 48

Tabel 3.33 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025 49

Tabel 3.34 Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyumas Tahun 2025 50

Tabel 3.35 Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun;
3. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat;
4. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam

mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah dengan membandingkan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD;

5. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan;
6. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut (DPPKBP3A) memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas:
 - a. DPPKBP3A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Selanjutnya, Tugas dan Fungsi DPPKBP3A adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi.

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d) Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

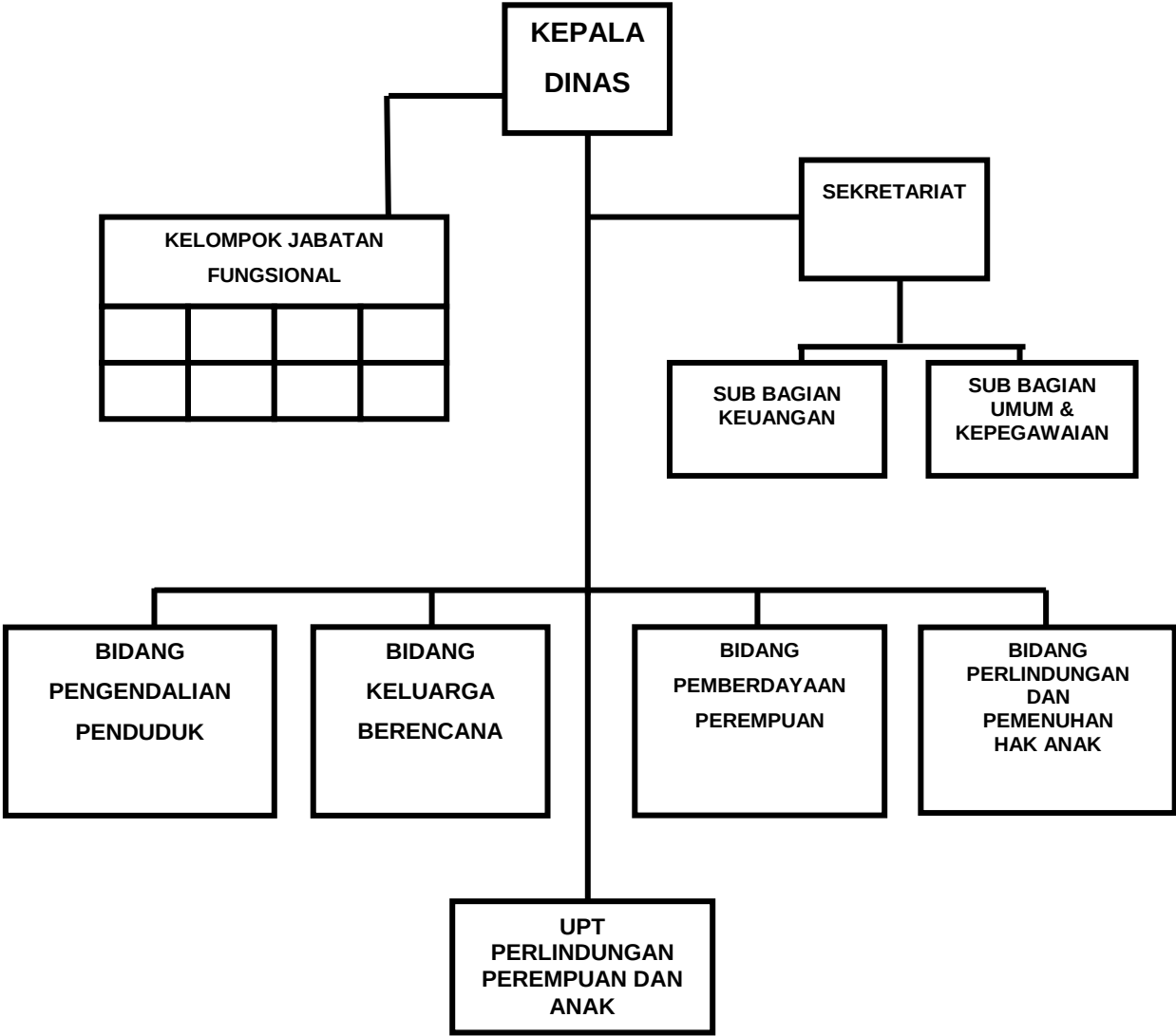
C. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, DPPKBP3A berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
- 4) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- 6) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
- 7) UPTD; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, struktur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas yang ditampilkan berdasarkan gambar bagan organisasi adalah sebagaimana gambar 1 berikut ini:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS



D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN (PNS/CPNS/PPPK) Berdasarkan Golongan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1	Golongan I	-	-	-	-
2	Golongan II	2	1	3	6,83
3	Golongan III	4	11	15	34,09
4	Golongan IV	2	5	7	15,90
5	PPPK	10	9	19	43,18
Jumlah				44	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPPKBP3A Kab. Banyumas, 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	PNS/CPNS/PPPK		Non PNS		Jumlah	Proporsi (%)
		L	P	L	P		
1	SD	2	-	-	-	2	3,18
2	SMP Sederajat	1	-	-	-	1	1,59
3	SMA Sederajat	7	2	3	2	14	22,22
4	D1	-	-	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	-	-
6	D3	3	5	-	1	9	14,29
7	S1	4	21	2	5	32	50,79
8	S2	1	4	-	-	5	7,93
Jumlah		18	32	5	8	63	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPPKBP3A Kab. Banyumas, 2025

E. ISU STRATEGIS

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan kepada kabupaten.

Pada tahun 2025, isu kependudukan masih menjadi hal yang sangat strategis, mengingat pertumbuhan penduduk masih bertambah seiring berjalannya waktu. Pertambahan penduduk tersebut tentunya berdampak pada banyak hal yang secara tidak langsung menjadi permasalahan hampir bagi setiap daerah seperti kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, terbatasnya akses pendidikan dan lain-lain. Yang masih menjadi bahasan utama, isu *stunting* juga menjadi bahasan yang selalu menjadi perhatian bagi Pemerintah mulai tingkat Pusat hingga Daerah.

Penanganan *stunting* yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Banyumas merupakan pelaksanaan upaya-upaya pencegahan *stunting* (intervensi spesifik) yang dilaksanakan melalui pendekatan pada kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat yang erat terkait dalam program KKBPK. Perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap permasalahan *stunting*, menjadikan peran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas menjadi krusial karena menjadi perangkat daerah yang langsung terlibat dalam upaya pencegahan *stunting* tersebut. Sehingga pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi atas penanganan *stunting* tersebut menjadi hal yang perlu dipertanggungjawabkan dengan baik pelaporannya.

Isu-isu strategis/ permasalahan

- ✓ Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (0,85 % di tahun 2024, data dari BPS);

- ✓ Masih tingginya angka *stunting* di Kabupaten Banyumas (2024), yaitu sebesar 19,6%;
- ✓ Kesetaraan gender belum maksimal, ditunjukan dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang menurun (IDG= 73,16 di tahun 2023 ; 69,77 di tahun 2024) selain itu, proporsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD masih rendah sebesar 18 % (9 orang);
- ✓ Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak(korban perempuan 49 orang ; korban anak 56 orang);
- ✓ Pencapaian nilai Kabupaten Layak Anak belum optimal (2023 = 543) belum mencapai jenjang Madya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik pula. Perencanaan strategis di Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah “**Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**”. Visi tersebut, telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2018 s.d. 2023). Misi yang dilakukan untuk mengaktualisasikan visi tersebut dikenal dengan “Hasta Kridha” sebagaimana tersebut, antara lain:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Namun demikian, pada kurun waktu 2024 s.d. 2026 Pemerintah Kabupaten Banyumas berada pada masa transisi, dimana tidak ada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, akan tetapi di isi oleh Penjabat Bupati (Pj). Sehingga pedoman perencanaan di Kabupaten Banyumas pada masa transisi ini merupakan produk eksekutif, yang kemudian disebut dengan RPD (Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026).

2. IKU (Indikator Kinerja Utama) DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Rencana Strategis Peralihan periode 2024-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diwujudkan dalam perencanaan selama 3 (tiga) tahun, sebagai wujud penjabaran perencanaan strategis kepala daerah sebagaimana tersebut di RPD 2024-2026. Wujud DPPKBP3A dalam menjalankan misinya tertuang dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

- a. Tujuan
 - 1) Terkendalinya jumlah penduduk;
 - 2) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

b. Sasaran

- 1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan;
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan anak.

Tujuan dan Sasaran strategis perangkat daerah DPPKBP3A tersebut kemudian diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

No.	Tujuan	Indikator Sasaran	Penjelasan
1	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : (Jumlah penduduk tahun n - jumlah penduduk tahun n-1) : jumlah penduduk tahun n-1 x 100% Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindukcapil Kab. Banyumas
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Formulasi : Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data yang terkait Kabupaten Layak Anak di DPPKBP3A Kab. Banyumas

Sumber: Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian atau tingkat capaian kinerja program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Banyumas.

Target yang ingin dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 1,35% ;
- 2. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 0,01% ;
- 3. Indeks Pemberdayaan Gender adalah 71,10;
- 4. Nilai Kabupaten Layak Anak adalah 610.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pelaksanaan Rencana Strategis periode 2024-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan. Secara ringkas Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2025 (RKT). Rencana Kinerja Tahunan tersebut memuat sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 1 (satu) tahun, indikator dan target kinerja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran strategis yang bersangkutan. Sejalan dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025 dalam rangka mewujudkan target yang tertuang di dalam RKT, maka disusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2025.

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat struktural/eselon di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai penerima amanah, dimana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya.

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2025 memuat perjanjian kinerja yang akan dicapai baik sesuai indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis maupun anggaran yang telah disahkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,59%	Formulasi : (Jumlah penduduk tahun n - jumlah penduduk tahun n-1) : jumlah penduduk tahun n-1 x 100% Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindukcapil Kab. Banyumas
2		Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	0,193%	Formulasi : (Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun n-1) - (Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun n) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindukcapil Kab. Banyumas
3	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	73,5	Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
4		Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	610	Formulasi : Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data yang terkait layak anak di DPPKBP3A Kab. Banyumas

Sumber: Dokumen Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 (RKT) selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2025 yang dibuat pada awal tahun memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang diampu oleh 10 program dengan 27 kegiatan dan total anggaran pada DPA Induk sebesar Rp. **29.315.386.982,00**.

Pada periode tahun 2025, dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, mengalami beberapa kali pergeseran dan efisiensi anggaran yang dikarenakan:

- Adanya kebutuhan anggaran dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya pada Bulan September 2025 ditetapkanlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025, berjumlah 27 kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sehingga total anggaran perubahan belanja langsung yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun 2025 berkurang menjadi sebesar Rp. **28.611.956.365,00**. Sehingga selisih pengurangan/efisiensi anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 824.999.332,00. Secara lengkap terkait anggaran tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	610.990.500
2.	Program Perlindungan Perempuan	256.940.000
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	57.501.000
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	4.087.500
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	263.747.500
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	254.770.000
7.	Program Pengendalian Penduduk	540.050.750
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.239.800.000
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.347.021.000
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	8.414.958.463
Jumlah		28.989.866.713

Sumber: DPPA Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merujuk pada Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang termasuk dalam indikator kinerja, melalui pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan dan Peningkatan

Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja di atas semula berdasarkan pada target tahun 2025 yang ingin dicapai sesuai RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Namun atas arahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas supaya disesuaikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya (2024).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan 4 indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, mampu 10 program dimana secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Program yang secara langsung dan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian 4 indikator kinerja sasaran strategis, yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- d. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Program Perlindungan Perempuan;
- f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- g. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- i. Program Perlindungan Khusus Anak;
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan KB bersumber pada Dana Transfer Pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKB dan DAK Fisik Reguler-Bidang Kesehatan Sub Bidang KB. Demikian juga sebagian besar kegiatan pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bersumber pada pos anggaran yang sama yaitu DAK Non Fisik BOKB. Selanjutnya, untuk kegiatan pada Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagian besar dibiayai dengan Dana Transfer Pusat DAK Non Fisik PPPA sebagian kecil dibiayai dengan APBD. Selain kegiatan pada Program tersebut di atas, semuanya bersumber pada APBD.

Capaian Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi dan Capaian Indikator Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025

TUJUAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Tujuan 1 Terkendalinya Jumlah Penduduk					
1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,59	1,03	65,01	Tidak tercapai
Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak					
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		73,5	69,77	94,92	Tidak tercapai
2. Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)		610	601	98,52	Tidak tercapai
Rata-rata Capaian				86,15	

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut di atas, maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja DPPKBP3A tahun 2025 adalah sebesar 86,15%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja yang pertama pada kelompok tujuan perangkat daerah, sesuai dengan data sebelumnya, Tujuan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam Renstra adalah

- ✓ Terkendalinya jumlah penduduk;
- ✓ Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

1. Tujuan Pertama “Terkendalinya Jumlah Penduduk”

Analisis akan dilakukan satu persatu terhadap tujuan DPPKBP3A tersebut di atas, untuk tujuan yang pertama “ Terkendalinya Jumlah Penduduk”, sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian realisasi Indikator Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025 untuk tujuan “ Terkendalinya Jumlah Penduduk” berdasarkan data pada tabel 3.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,59	1,03	65,01

Sumber : e Monev

Tujuan pertama “Terkendalinya Jumlah Penduduk” dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), sesuai arahan fasilitator di Bapperida Kabupaten Banyumas, capaian kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2025 agar supaya mengambil data dari BPS (Badan Pusat Statistik).

Berdasarkan target sebesar 0,59% terealisasi sebesar 1,03% dengan capaian 65,01%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2 tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023					
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,77	0,796	155,03
Tahun 2024					
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,78	0,605	122,44
Tahun 2025					
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,59	1,03	65,01

Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan capaian indikator tujuan LPP tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tersaji pada tabel 3.3 di atas :

- 1) Pencapaian kinerja tujuan pertama “Terkendalinya Jumlah Penduduk” DPPKBP3A Tahun 2023 dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk yang merupakan indikator bersifat negatif (semakin kecil, semakin baik) berada pada angka 0,796% melebihi target 1,77% dengan capaian 155,03%;
- 2) Kemudian, Pencapaian kinerja tujuan pertama DPPKBP3A Tahun 2024 untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk berada pada angka 0,605% melebihi target 0,78% dengan capaian 122,44% meningkat dari tahun 2023;
- 3) Selanjutnya, pencapaian kinerja tujuan pertama tersebut di tahun 2025, LPP berada pada realisasi di angka 1,03% dari target 0,59% dengan

capaian 65,01% (persentase capaian menurun jika dibandingkan tahun 2023 dan 2024).

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator tujuan pertama “Terkendalinya Jumlah Penduduk” di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas untuk tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
			Target	Realisasi	%		
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,59	1,03	65,01	1,34	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan Tabel 3.4 target capaian kinerja tujuan pertama “Terkendalinya Jumlah Penduduk” di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Kinerja yang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, pada akhir tahun 2025 mendapatkan realisasi sebesar 1,03% dari target yang ditetapkan sebesar 0,59% dengan capaian kinerja sebesar 65,01%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2026 dengan target 1,34% maka capaian kinerja indikator LPP tersebut sebesar%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tujuan pertama “Terkendalinya Jumlah Penduduk” di DPPKBP3A tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga)

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra 2025			
			BKKBN	Kementrian PPPA	DP3AP2KB Prov. Jateng	Kabupaten Purbalingga
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,03 %	N/A	N/A	N/A	1,53%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Analisis capaian kinerja perangkat daerah (DPPKBP3A) tahun 2025 dibandingkan dengan target indikator yang merupakan indikator dari tujuan pada Renstra Instansi Vertikal yang terkait dengan kinerja DPPKBP3A seperti BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2025 ditarget sebesar 0,59%, terealisasi 1,03% mengikuti data yang dikeluarkan oleh BPS, namun demikian dari 3 (tiga) Instansi vertikal yang ada (BKKBN, Kementerian PPPA dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah), tidak terdapat indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (N/A) dalam dokumen perencanaannya. Hal ini tentu saja tidak dapat dibandingkan capaian yang diperoleh DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dengan Instansi vertikalnya. Namun, jika dibandingkan dengan standar kabupaten sekitar (DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, tahun 2024 target LPP= 1,53%) maka capaian kinerja LPP di DPPKBP3A telah melebihi (di atas) target renstra DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja ditunjang oleh faktor-faktor yang mendukungnya, berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja tujuan pertama “Terkendalnya Jumlah Penduduk” di DPPKBP3A tahun 2025, yaitu:

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

- ✓ Pelaksanaan pelayanan KB pasca salin semakin baik dan meningkat;
- ✓ Penggunaan KB metode jangka panjang (MKJP) semakin meningkat;
- ✓ Sosialisasi Program Bangga Kencana menyentuh secara menyeluruh di wilayah dengan adanya Kampung KB di setiap desa;
- ✓ Pendanaan program dan kegiatan secara terus menerus dari Pemerintah Pusat/BKKBN melalui dana DAK Non Fisik BOKB.

Selanjutnya, solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja indikator *Laju Pertumbuhan Penduduk* antara lain:

- ✓ Adanya hambatan/ kendala berkurangnya jumlah SDM Penyuluh KB di Kabupaten Banyumas, dilakukan upaya dengan melibatkan Kader PPKBD yang ada di desa-desa dalam rangka membantu kinerja Penyuluh KB mensosialisasikan Program Bangga Kencana;

- ✓ Adanya hambatan/ kendala dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah/OPD serta Rumah Sakit yang ada untuk menanggulangi permasalahan stunting pada satu kecamatan dengan menggalakan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPPKBP3A untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan *refocussing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan pertama: “Terkendalinya Jumlah Penduduk” DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
	OPD			
1.	Program Pengendalian Penduduk	649.700.000	540.050.750	(109.649.250)
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.239.800.000	9.239.800.000	0
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.436.400.900	9.347.021.000	(89.379.900)
			Efisiensi	199.029.150

Sumber : Rekap DPA SIPD RI, 2025

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan pertama *Terkendalinya Jumlah Penduduk*, antara lain:

Tabel 3.7
Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan: Terkendalinya Jumlah Penduduk Tahun 2025

No	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
1.	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total atau TFR	1,69 (111,05%)	540.050.750	474.341.708 (87,83)
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP; 2. Presentase Kampung KB yang terfasilitasi; 3. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	1. 49,38 (113%); 2. 90 (100%); 3. 68,21 (101,46%)	9.239.800.000	8.362.322.680 (90,5)
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI	68,34 (93,23%)	9.347.021.000	9.305.736.000 (99,55)

Sumber : e Monev 2025

Berdasarkan tabel 3.7 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja ketiga program tersebut adalah 103,74% $(111,05 + (113+100+101,46) + 93,23)$, sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangannya adalah 92,62% $(87,83+90,5+99,55)$. Hasil perbandingan antara capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi keuangan yaitu: 103,56% : 92,62%. Program yang mengalami efisiensi penggunaan anggaran meliputi:

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam pengendalian penduduk dengan sasaran program Para Penyuluh KB, Petugas Lini Lapangan KB, dan Balai Penyuluhan KB, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.050.750 dengan realisasi sebesar Rp. 474.341.708 dengan tingkat capaian sebesar 87,83%.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam peningkatan dan pembinaan pelayanan KB dengan sasaran program meliputi masyarakat/PUS, Balai Penyuluhan KB, Kelompok Kegiatan Kampung KB, terdiri atas 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

9.239.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.362.322.680 dengan tingkat capaian sebesar 90,5%.

- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akseptor KB dengan sasaran program meliputi masyarakat/PUS, Balai Penyuluhan KB, Kelompok Kegiatan /Pokja KB, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.347.021.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.305.736.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,55%.

2. Tujuan kedua “ Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak”
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis untuk tujuan DPPKBP3A yang kedua “ Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak”, sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,5	69,77	95,77
2	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	angka	610	601	98,52

Sumber : e Monev

Pada tujuan kedua : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan capaian angka Indeks Pemberdayaan Gender yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Capaian yang dihasilkan pada akhir tahun 2025 merupakan capaian IDG Tahun 2024, karena pada akhir tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2026 data capaian IDG Kabupaten/Kota belum keluar/ belum dirilis oleh BPS. Realisasi kinerja sebesar 69,77 dari target sebesar 73,5 dengan capaian 95,77%.
- 2) Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), realisasi dicapai pada angka 601. Nilai ini juga merupakan hasil penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

Tahun 2024 yang dilaksanakan pada awal tahun 2025. Sedangkan hasil penilaian tersebut telah meningkatkan jenjang/grade KLD di Kabupaten Banyumas menjadi jenjang **Madya** dari sebelumnya jenjang **Pratama** yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA RI. Capaian nilai KLA pada tahun 2025 ini belum memenuhi target yang ada yaitu 610, dengan capaian hanya 98,52%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan capaian indikator tujuan kedua DPPKBP3A “ Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak” tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023					
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,94	72,77	101,15
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	625	595	95,2
Tahun 2024					
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,8	73,16	100,49
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	600	543	83.54
Tahun 2025					
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,5	69,77	95,77
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	610	601	98,52

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023-2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

- 1) Pencapaian kinerja tujuan kedua DPPKBP3A Tahun 2023 untuk indikator IDG, mencapai target dengan capaian 101,15% pada angka 72,77 dari target 71,94. Untuk indikator Nilai KLA, juga masih berada di bawah target (625) dengan capaian 95,2% pada angka 595.
- 2) Pencapaian kinerja tujuan kedua DPPKBP3A di Tahun 2024 untuk indikator IDG, mendapatkan capaian 100,49% pada angka 73,16 dari target 72,8. Untuk indikator Nilai KLA, pada tahun ini (2024) semakin menurun berada di bawah target (600) dengan capaian 83,54% pada angka 543.
- 3) Di tahun 2025, Untuk IDG, persentase capaian turun diangka 95,77% dengan realisasi 69,77 yang merupakan nilai capaian IDG tahun 2024,

dari target sebesar 73,5. Sedangkan untuk indikator Nilai KLA di tahun 2025, telah mendapatkan hasil penilaian dari Kementerian terkait (PPPA) sehingga mendapatkan nilai 601, dengan kenaikan jenjang pada kelompok **Madya**.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator tujuan di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas untuk tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
			Target	Realisasi	%		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	73,5	69,77	95,77	71,20	98
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	610	601	98,52	620	96,93

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Tujuan kedua di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah “Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak” dapat dijelaskan berdasarkan setiap indikator, sebagai berikut:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), pada akhir tahun 2025 mendapatkan realisasi sebesar 69,77 dari target yang ditetapkan sebesar 73,5 dengan capaian kinerja sebesar 95,77%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2026 dengan target 71,20 maka capaian kinerja indikator IDG tersebut sebesar 98%.
 - 2) Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), pada akhir tahun 2025 mendapatkan realisasi sebesar 601 dari target yang ditetapkan sebesar 610 dengan capaian kinerja sebesar 98,52%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2026 dengan target 620 maka capaian kinerja indikator Nilai KLA tersebut masih lebih rendah sebesar 96,93%.
- d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar

Perbandingan realisasi kinerja DPPKBP3A tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga)

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra 2025
----	-------------------	-----------	---------------------

			BKKBN	Kementeri an PPPA	DP3AP2KB Prov. Jateng	Kabupaten Purbalingga
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,77	N/A	N/A	N/A	72
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	601	N/A	N/A	N/A	660

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Analisis capaian kinerja untuk tujuan kedua di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah “ Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak” tahun 2025 dibandingkan dengan target indikator yang merupakan indikator dari tujuan pada Renstra Instansi Vertikal yang terkait dengan kinerja DPPKBP3A seperti BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

- 1) *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2025 dengan target pada angka 73,5 memperoleh capaian sebesar 69,77 , tidak dapat dibandingkan dengan target Kementerian PPPA di tahun 2025 karena tidak adanya data dukung. Selanjutnya dengan Instansi vertikal lainnya (BKKBN dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah) indikator ini tidak bisa dibandingkan karena tidak terpasang dalam perencanaannya (N/A). Namun, jika dibandingkan dengan standar kabupaten sekitar (DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, tahun 2025 target IDG= 72) maka capaian kinerja IDG di DPPKBP3A sebesar 96,9% dari target renstra DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga.*
- 2) *Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025 dengan target pada angka 610 memperoleh capaian sebesar 601. Apabila dibandingkan dengan instansi vertikal (BKKBN, Kementerian PPPA, dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah) indikator ini tidak bisa dibandingkan karena tidak terpasang dalam perencanaannya (N/A). Namun, jika dibandingkan dengan standar kabupaten sekitar (DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, tahun 2025 target nilai KLA = 660) maka capaian kinerja KLA di DPPKBP3A masih lebih rendah dari target renstra DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga sebesar 91,06%.*

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tujuan kedua di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas “

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak” tahun 2025 ditunjang oleh faktor-faktor yang mendukungnya, berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dimaksud, yaitu:

- 1) Kegagalan pencapaian target indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - ✓ Menurunnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif;
 - ✓ Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
 - ✓ Menurunnya keterlibatan dan kualitas perempuan dalam pembangunan;
 - ✓ Meningkatnya pekerja perempuan di sector informal;
 - ✓ Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Kegagalan pencapaian target indikator Nilai Kabupaten Layak Anak
 - ✓ Belum terpenuhinya indikator-indikator yang mendukung pencapaian nilai KLA lebih tinggi/naik seperti keterlibatan masyarakat, dunia usaha maupun media dalam usaha perlindungan dan pemenuhan hak anak karena keterbatasan anggaran untuk sosialisasi;
 - ✓ Belum optimalnya keterlibatan, kesadaran dan tanggung jawab OPD dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai unsur penilaian KLA;
 - ✓ Masih tingginya angka Perkawinan Anak;
 - ✓ Belum adanya dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) terkait KLA.

Solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja:

a) Indeks Pemberdayaan Gender

Adanya masyarakat perempuan yang menjadi kepala keluarga atau tidak berpenghasilan mendorong DPPKBP3A untuk mengoptimalkan

pemberian pelatihan/ *workshop* guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ekonomi agar berdaya guna dan mandiri, seperti pelatihan pembuatan batik sederhana, usaha pembuatan makanan, *hand bouqet* dan lain-lain. Ada juga pelatihan *public speaking* bagi anggota organisasi wanita dalam upaya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan berorganisasi.

b) Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

- ✓ Adanya penyebab belum terpenuhinya indikator-indikator yang mendukung pencapaian nilai KLA lebih tinggi/naik, seperti keterlibatan masyarakat, dunia usaha maupun media dalam usaha perlindungan dan pemenuhan hak anak karena keterbatasan anggaran maka solusi yang telah dilakukan dengan mengadakan:
 - Intensifikasi permasalahan KLA melalui Rakor Gugus Tugas KLA dan Pelatihan Konvensi Hak Anak.
- ✓ Adanya kendala belum dimilikinya RAD KLA, maka solusi yang dilakukan dengan merancang penyusunan RAD KLA melalui:
 - Rakor pembahasan dan penyusunan RAD KLA;
 - Desk pengisian matrik RAD KLA
- ✓ Masih tingginya angka perkawinan anak ditindaklanjuti dengan pemberian kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di beberapa wilayah kecamatan di lingkungan Kabupaten Banyumas.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPPKBP3A untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan *refocussing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan kedua di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas “Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak” tahun 2025 dan tidak diperoleh adanya efisiensi anggaran, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
	OPD		31.663.234.435	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	640.000.000	610.990.500	(Rp. 29.009.500)
2.	Program Perlindungan Perempuan	268.390.000	256.940.000	(Rp. 11.450.000)
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	57.501.000	57.501.000	0
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	15.000.000	4.087.500	(Rp. 10.912.500)
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	280.000.000	263.747.500	(Rp. 16.252.500)
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	185.750.000	185.750.000	0
	UPTD PPA		69.020.000	
1.	Program Perlindungan Khusus Anak	69.020.000	69.020.000	0
			Efisiensi	(Rp. 67.624.500)

Sumber : Rekap DPA SIPD RI, 2025

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan kedua *Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak*, antara lain:

Tabel 3.13
Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan: *Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak* Tahun 2025

No	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG;	1. 100 (100%) 2. 18 (75%)	610.990.500	560.567.500 (91,75%)

	Perempuan	2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.			
2.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	256.940.000	247.001.983 (96,13%)
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	0,025 (75,76%)	57.501.000	57.313.500 (99,67%)
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	44,82 (100%)	4.087.500	4.087.500 (100%)
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	90 (100%)	263.747.500	257.399.768 (97,6%)
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	254.770.000	249.622.000 (97,98%)

Sumber : e Monev 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja keenam program tersebut adalah $(100+75+100+75,76+100+100+100=650,76\%:7)= 93\%$. sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangannya adalah $(91,75+96,13+99,67+100+97,6+97,98)=583,13\% : 6 = 97,18\%$. Program yang mengalami efisiensi penggunaan anggaran meliputi:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan dengan sasaran program meliputi masyarakat/kelompok kegiatan/organisasi perempuan, OPD, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.990.500 dengan realisasi sebesar Rp. 560.567.500 dengan tingkat capaian sebesar 91,75%.
- 2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dengan sasaran program meliputi masyarakat/kelompok kegiatan/organisasi perempuan, OPD, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256.940.000 dengan realisasi sebesar Rp. 247.001.983 dengan tingkat capaian sebesar 96,13%.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan sasaran program meliputi perangkat daerah, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1

(satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.501.000 dengan realisasi sebesar Rp. 57.313.500 dengan tingkat capaian sebesar 99,67%.

4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak dengan sasaran program meliputi kelompok kegiatan anak/ forum anak, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.747.500 dengan realisasi sebesar Rp. 257.399.768 dengan tingkat capaian sebesar 97,6%.

5) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam mencegah, melindungi dan mengadvokasi anak-anak dari kasus kekerasan dengan sasaran program meliputi masyarakat anak/ OPD, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.770.000 dengan realisasi sebesar Rp. 249.622.000 dengan tingkat capaian sebesar 97,98%.

3. Sasaran

Selanjutnya analisis akan dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah (DPPKBP3A), yang meliputi:

- ✓ *Menurunnya laju pertumbuhan penduduk* dengan indikator Penurunan LPP;
- ✓ *Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan* dengan indikator IDG;
- ✓ *Meningkatnya kualitas perlindungan anak* dengan indikator Nilai KLA.

Sasaran : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator Penurunan LPP

Analisis yang akan dibahas pada kelompok sasaran ini hanya pada sasaran pertama yaitu “Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”.

a. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.14

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Sasaran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	--------	--------	-----------	---------

					(%)
1	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,193	0,03	176

Sumber : e Monev

Analisis atas pencapaian sasaran tersebut di atas adalah bahwa “Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk” dengan indikator Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pada tahun 2025 di target pada angka 0,193% dan terealisasi pada angka 0,03%, dengan capain 176%.

- b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya

Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan capaian yang didapat di tahun 2023 dan 2024 maka dengan ini kami paparkan realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran di tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023					
1.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,01	0,015	150
Tahun 2024					
1.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,015	0,191	1273,33
Tahun 2025					
1.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,193	0,03	176

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023-2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa:

Pencapaian kinerja sasaran DPPKBP3A Tahun 2023 untuk indikator Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk berada pada angka 0,015% melebihi target 0,01% dengan capaian 150%. Sedangkan untuk Tahun 2024 dengan capaian 1273% pada angka 0,191% dari target 0,015%. Untuk Tahun 2025, dengan capaian kinerja 176% dengan target 0,193% terealisasi pada angka 0,03%.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
			Target	Realisasi	%		

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
			Target	Realisasi	%		
1.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,193	0,03	176	0,01	300
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,5	69,77	95	71,20	98
3.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	610	601	98,52	620	96,93

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Analisis atas pencapaian sasaran DPPKBP3A yang pertama yaitu *Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk* dengan indikator Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pada tahun 2025 di target pada angka 0,193% dan terealisasi pada angka 0,03% dengan capaian kinerja yang lebih tinggi dari target akhir Renstra di tahun 2026 (0,01%).

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar

Analisis atas pencapaian sasaran DPPKBP3A tahun 2025 untuk indikator Penurunan LPP tidak dapat dibandingkan, karena dari Instansi Pusat dan Kabupaten sekitar tidak ada indikator Penurunan LPP.

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga)

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra 2025			
			BKKBN	Kementeri an PPPA	DP3AP2KB Prov. Jateng	Kabupaten Purbalingga
1.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,03 %	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran pertama “*Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk*” di DPPKBP3A tahun 2025 selaras dengan uraian analisis sebagaimana tersaji pada tujuan pertama DPPKBP3A, yaitu: Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

- ✓ Pelaksanaan pelayanan KB pasca salin semakin meningkat;
- ✓ Penggunaan KB metode jangka panjang (MKJP) semakin meningkat;
- ✓ Sosialisasi Program Bangga Kencana menyentuh secara menyeluruh di wilayah dengan adanya Kampung KB di setiap desa;
- ✓ Pendanaan program dan kegiatan secara terus menerus dari Pemerintah Pusat/BKKBN melalui dana DAK Non Fisik BOKB.

Selanjutnya, solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja indikator *Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk* antara lain:

- ✓ Adanya hambatan/ kendala berkurangnya jumlah SDM Penyuluh KB di Kabupaten Banyumas, dilakukan upaya dengan melibatkan Kader PPKBD yang ada di desa-desa dalam rangka membantu kinerja Penyuluh KB mensosialisasikan Program Bangga Kencana;
- ✓ Adanya hambatan/ kendala dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah/OPD serta Rumah Sakit yang ada untuk menanggulangi permasalahan stunting dengan menggalakan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPPKBP3A untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja sasaran pertama: “Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk” pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
	OPD			
1.	Program Pengendalian Penduduk	649.700.000	540.050.750	(109.649.250)
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.239.800.000	9.239.800.000	0
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.436.400.900	9.347.021.000	(89.379.900)
			Efisiensi	(199.029.150)

Sumber : Rekap DPA SIPD RI, 2025

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran DPPKBP3A yang pertama “Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk”:

Tabel 3.19
Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran: Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025

No	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
1.	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total atau TFR	1,69 (111,05%)	540.050.750	474.341.708 (87,83)
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP; 2. Presentase Kampung KB yang terfasilitasi; 3. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	1. 49,38 (113%); 2. 90 (100%); 3. 68,21 (101,46%)	9.239.800.000	8.362.322.680 (90,5)
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI	68,34 (93,23%)	9.347.021.000	9.305.736.000 (99,55)

Sumber : e Monev 2025

Berdasarkan tabel 3.19 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja ketiga program tersebut adalah 103,74% (111,05 + (113+100+101,46) + 93,23), sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangannya adalah 92,62% (87,83+90,5+99,55). Hasil perbandingan antara capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi keuangan yaitu: 103,56% : 92,62%. Program yang mengalami efisiensi penggunaan anggaran meliputi:

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam pengendalian penduduk dengan sasaran program Para Penyuluh KB, Petugas Lini Lapangan KB, dan Balai Penyuluhan KB, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 540.050.750 dengan realisasi sebesar Rp. 474.341.708 dengan tingkat capaian sebesar 87,83%.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam peningkatan dan pembinaan pelayanan KB dengan sasaran program meliputi masyarakat/PUS, Balai Penyuluhan KB, Kelompok Kegiatan Kampung KB, terdiri atas 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.239.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.362.322.680 dengan tingkat capaian sebesar 90,5%.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akseptor KB dengan sasaran program meliputi masyarakat/PUS, Balai Penyuluhan KB, Kelompok Kegiatan /Pokja KB, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.347.021.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.305.736.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,55%.

Sasaran : *Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan* dengan indikator IDG;

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis untuk sasaran DPPKBP3A yang kedua “ *Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan*”, sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,5	69,77	95,77

Sumber : e Monev

Pada sasaran kedua : “*Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan*” dengan indikator kinerja yaitu: *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)* merupakan capaian angka Indeks Pemberdayaan Gender yang dikeluarkan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Capaian yang dihasilkan pada akhir tahun 2025 merupakan capaian IDG Tahun 2024, karena pada akhir tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2026 data capaian IDG Kabupaten/Kota belum keluar/ belum dirilis oleh BPS. Realisasi kinerja sebesar 69,77 dari target sebesar 73,5 dengan capaian 95,77%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan capaian indikator sasaran kedua DPPKBP3A “Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan” tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023					
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,94	72,77	101,15
Tahun 2024					
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,8	73,16	100,49
Tahun 2025					
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,5	69,77	95,77

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023-2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

- 1) Pencapaian kinerja sasaran kedua DPPKBP3A di Tahun 2023 untuk indikator IDG, sudah meningkat dengan capaian 101,15% pada angka 72,77 dari target 71,94.
- 2) Pencapaian kinerja sasaran kedua DPPKBP3A di Tahun 2024 untuk indikator IDG, sudah meningkat dengan capaian 100,49% pada angka 73,16 dari target 72,8. Tidak ada perubahan formulasi pada indikator ini di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023).
- 3) Untuk IDG, persentase capaian naik diangka 95,77% dengan realisasi 69,77 dari target sebesar 73,5.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator sasaran di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas untuk tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
			Target	Realisasi	%		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	73,5	69,77	95,77	71,20	98

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, target capaian kinerja sasaran kedua di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah “ *Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan*” dapat dijelaskan berdasarkan indikator, sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), pada akhir tahun 2025 mendapatkan realisasi sebesar 69,77 (Nilai tahun 2024) dari target yang ditetapkan sebesar 73,5 dengan capaian kinerja sebesar 95,77%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2026 dengan target 71,20 maka capaian kinerja indikator IDG tersebut sebesar 98%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar

Perbandingan realisasi kinerja DPPKBP3A tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga)

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra 2025			
			BKKBN	Kementerian PPPA	DP3AP2KB Prov. Jateng	Kabupaten Purbalingga
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,77	N/A	N/A	N/A	72.8

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Analisis capaian kinerja untuk sasaran kedua di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah “ *Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan*” tahun 2025 dibandingkan dengan target indikator yang merupakan indikator dari tujuan pada Renstra Instansi vertikal yang terkait dengan kinerja DPPKBP3A seperti BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2025 dengan target pada angka 73,5 memperoleh capaian sebesar 69,77, apabila dibandingkan dengan target Kementerian PPPA di tahun 2025 capaian IDG Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan target Kementerian PPPA karena tidak adanya data. Selanjutnya dengan Instansi vertikal lainnya (BKKBN dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah) indikator ini tidak bisa dibandingkan karena tidak terpasang dalam perencanaannya (N/A). Namun, jika dibandingkan dengan standar kabupaten sekitar (DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, tahun 2025 target IDG= 72,8) maka capaian kinerja IDG di DPPKBP3A masih di bawah target renstra DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 95,83%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja sasaran kedua di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan” tahun 2025 ditunjang oleh faktor-faktor yang mendukungnya, berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja dimaksud, yaitu:

1) Kegagalan pencapaian target indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- ✓ Menurunnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif;
- ✓ Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
- ✓ Menurunnya keterlibatan dan kualitas perempuan dalam pembangunan;
- ✓ Meningkatnya pekerja perempuan di sector informal;
- ✓ Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

2) Solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja:

Indeks Pemberdayaan Gender

Adanya masyarakat perempuan yang menjadi kepala keluarga atau tidak berpenghasilan mendorong DPPKBP3A untuk mengoptimalkan pemberian pelatihan/ workshop guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ekonomi agar berdaya guna dan mandiri, seperti pelatihan

pembuatan batik sederhana, usaha pembuatan makanan, hand bouquet dan lain-lain. Ada juga pelatihan public speaking bagi anggota organisasi wanita dalam upaya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan berorganisasi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPPKBP3A untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan *refocussing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja sasaran kedua di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan” tahun 2025 dan diperoleh adanya efisiensi anggaran, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
	OPD			
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	640.000.000	610.990.500	(Rp. 29.009.500)
2.	Program Perlindungan Perempuan	268.390.000	256.940.000	(Rp. 11.450.000)
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	57.501.000	57.501.000	0
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	15.000.000	4.087.500	(Rp. 10.912.500)
			Efisiensi	Rp. 51.372.000

Sumber : Rekap DPA SIPD RI, 2025

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran kedua *Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan*, antara lain:

Tabel 3.25
Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan* Tahun 2025

No	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG; 2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	1. 100 (100%) 2. 18 (75%)	610.990.500	560.567.500 (91,75%)
2.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	256.940.000	247.001.983 (96,13%)
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	0,025 (75,76%)	57.501.000	57.313.500 (99,67%)
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	44,82 (100%)	4.087.500	4.087.500 (100%)

Sumber : e Monev 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja keempat program tersebut adalah $(100+75+100+75,76+100=450,76\%:5)= 90,15\%$. sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangannya adalah $(91,75+96,13+99,67+100)\% : 4 = 96,89\%$. Program yang mengalami efisiensi penggunaan anggaran meliputi:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan dengan sasaran program meliputi masyarakat/kelompok kegiatan/organisasi perempuan, OPD, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.990.500 dengan realisasi sebesar Rp. 560.567.500 dengan tingkat capaian sebesar 91,75%.
- 2) Program Perlindungan Perempuan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dengan sasaran program meliputi masyarakat/kelompok kegiatan/organisasi perempuan, OPD, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256.940.000 dengan realisasi sebesar Rp. 247.001.983 dengan tingkat capaian sebesar 96,13%.

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan sasaran program meliputi perangkat daerah, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.501.000 dengan realisasi sebesar Rp. 57.313.500 dengan tingkat capaian sebesar 99,67%.

Sasaran : “*Meningkatnya kualitas perlindungan anak*”

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis untuk sasaran DPPKBP3A ketiga “*Meningkatnya kualitas perlindungan anak*”, sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	angka	610	601	98,52

Sumber : e Monev 2024

*Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), realisasi dicapai pada angka 601. Nilai ini juga merupakan hasil penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada awal tahun 2025. Capaian Nilai KLA pada tahun 2025 ini belum memenuhi target yang ada yaitu 610, dengan capaian hanya 98,52%, namun terjadi peningkatan jenjang/grade KLA nya yaitu jenjang **Madya**.*

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan capaian indikator sasaran ketiga DPPKBP3A “ *Meningkatnya kualitas perlindungan anak*” tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023					
1.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	625	595	95,2
Tahun 2024					
1.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	650	543	83,54
Tahun 2025					
1.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	610	601	98,52

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023-2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

- 1) Pencapaian kinerja sasaran ketiga DPPKBP3A Tahun 2023 untuk indikator Nilai KLA, juga masih berada di bawah target (625) dengan capaian 95,2% pada angka 595.
- 2) Pencapaian kinerja sasaran ketiga DPPKBP3A di Tahun 2024 untuk indikator Nilai KLA, pada tahun ini (2024) semakin menurun berada di bawah target (650) dengan capaian 83,54% pada angka 543.
- 3) Sedangkan untuk indikator Nilai KLA di tahun 2025, setelah mendapatkan penilaian dari Kementerian terkait (PPPA) diperoleh hasil (601). Untuk Penilaian tahun 2025 ini sebenarnya merupakan hasil penilaian KLA tahun 2024, danmendapatkan peningkatan status menjadi jenjang **Madya**.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator sasaran di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas untuk tahun 2024 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
			Target	Realisasi	%		
1.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	610	601	98,52	620	96,93

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, target capaian kinerja sasaran ketiga di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas “ *Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak*” dapat dijelaskan berdasarkan indikator, sebagai berikut:

Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), pada akhir tahun 2025 mendapatkan realisasi sebesar 601 dari target yang ditetapkan sebesar 610 dengan capaian kinerja sebesar 98,52%, jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2026 dengan target 620 maka capaian kinerja indikator Nilai KLA tersebut masih lebih rendah sebesar 96,93%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar

Perbandingan realisasi kinerja DPPKBP3A tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar (BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB dan Kabupaten Purbalingga)

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra 2025			
			BKKBN	Kementeri an PPPA	DP3AP2KB Prov. Jateng	Kabupaten Purbalingga
1.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	601	N/A	N/A	N/A	660

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Analisis capaian kinerja untuk sasaran ketiga di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah “ Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak” tahun 2025 dibandingkan dengan target indikator yang merupakan indikator dari tujuan pada Renstra Instansi Vertikal yang terkait dengan kinerja DPPKBP3A seperti BKKBN, Kementerian PPPA, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025 dengan target pada angka 610 memperoleh capaian sebesar 601. Apabila dibandingkan dengan instansi vertikal (BKKBN, Kementerian PPPA, dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah) indikator ini tidak bisa dibandingkan karena tidak terpasang dalam perencanaannya (N/A). Namun, jika dibandingkan dengan standar kabupaten sekitar (DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga, tahun 2024 target nilai KLA = 660) maka capaian kinerja KLA di DPPKBP3A masih lebih rendah dari target renstra DinsosP2KBP3A Kabupaten Purbalingga (91%).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja sasaran ketiga di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak” tahun 2025 ditunjang oleh faktor-faktor yang mendukungnya, berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dimaksud, yaitu:

1) Kegagalan pencapaian target indikator Nilai Kabupaten Layak Anak

- ✓ Belum terpenuhinya indikator-indikator yang mendukung pencapaian nilai KLA lebih tinggi/naik seperti keterlibatan masyarakat, dunia usaha maupun media dalam usaha perlindungan dan pemenuhan hak anak karena keterbatasan anggaran untuk sosialisasi;
- ✓ Belum optimalnya kesadaran tanggung jawab OPD dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai unsur penilaian KLA;
- ✓ Masih tingginya angka Perkawinan Anak;
- ✓ Belum adanya dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) terkait KLA.

2) Solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja:

Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

- ✓ Adanya penyebab belum terpenuhinya indikator-indikator yang mendukung pencapaian nilai KLA lebih tinggi/naik, seperti keterlibatan masyarakat, dunia usaha maupun media dalam usaha perlindungan dan pemenuhan hak anak karena keterbatasan anggaran maka solusi yang telah dilakukan dengan mengadakan:
 - Intensifikasi permasalahan KLA melalui Rakor Gugus Tugas KLA dan Pelatihan Konvensi Hak Anak.
- ✓ Adanya kendala belum dimilikinya RAD KLA, maka solusi yang dilakukan dengan merancang penyusunan RAD KLA melalui:
 - Rakor pembahasan dan penyusunan RAD KLA;
 - Desk pengisian matrik RAD KLA
 - Masih tingginya angka perkawinan anak ditindaklanjuti dengan pemberian kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak

di beberapa wilayah kecamatan di lingkungan Kabupaten Banyumas

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPPKBP3A untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan *refocussing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja sasaran ketiga di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak” tahun 2025 dan tidak diperoleh adanya efisiensi anggaran, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan Anggaran DPA Induk dengan DPA Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
	OPD			
1.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	15.000.000	4.087.500	(Rp. 10.912.500)
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	280.000.000	263.747.500	(Rp. 16.252.500)
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	185.750.000	185.750.000	0
	UPTD PPA			
1.	Program Perlindungan Khusus Anak	69.020.000	69.020.000	0
			Efisiensi	Rp. 27.165.000

Sumber : Rekap DPA SIPD RI, 2025

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran ketiga *Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak*, antara lain:

Tabel 3.31
Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran: *Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak*
Tahun 2025

No	Program	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
1.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	44,82 (100%)	4.087.500	4.087.500 (100%)
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	90 (100%)	263.747.500	257.399.768 (97,6%)
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	254.770.000	249.622.000 (97,98%)

Sumber : e Monev 2025

Berdasarkan tabel 3.31 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja keenam program tersebut adalah $(100+100+100:3)= 100\%$. sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangannya adalah $(100+97,6+97,98)\% : 3 = 98,52\%$. Program yang mengalami efisiensi penggunaan anggaran meliputi:

1) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak dengan sasaran program meliputi kelompok kegiatan anak/ forum anak, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.747.500 dengan realisasi sebesar Rp. 257.399.768 dengan tingkat capaian sebesar 97,6%.

2) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pemerintah dalam mencegah, melindungi dan mengadvokasi anak-anak dari kasus kekerasan dengan sasaran program meliputi masyarakat anak/ OPD, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.770.000 dengan realisasi sebesar Rp. 249.622.000 dengan tingkat capaian sebesar 97,98%.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.32 berikut ini:

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Keterangan (%)
DINAS		28.890.846.712	27.133.044.339	93,92
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	610.990.500	560.567.500	91,75
2.	Program Perlindungan Perempuan	256.940.000	247.001.983	96,13
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	57.501.000	57.313.500	99,67
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	4.087.500	4.087.500	100
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	263.747.500	257.399.768	97,59
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	185.750.000	180.998.000	97,44
7.	Program Pengendalian Penduduk	540.050.750	474.341.708	87,83
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.239.800.000	8.362.322.680	90,50
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.347.021.000	9.305.736.000	99,56
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	8.384.958.462	7.683.275.700	91,63
UPTD		99.020.001	98.253.500	99,22
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	30.000.001	29.629.500	98,76
2	Program Perlindungan Khusus Anak	69.020.000	68.624.000	99,42
Jumlah		28.989.866.713,00	27.231.297.839	93,93

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran dan Program Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2025

Selanjutnya, tingkat efektifitas anggaran yang telah digunakan terhadap capaian tujuan/sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.33 berikut ini:

Tabel 3.33
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah dan Indikator Kinerja	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	65,01	18.142.400.388	92,63
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	176,67		
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	95,77	868.970.483	96,88
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	98,52	511.109.268	98,61
Jumlah				19.522.480.139	96,04

Berdasarkan tabel 3.32 dan 3.33 diketahui bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, direncanakan anggaran sebesar Rp. **28.989.866.713,00**. Dari rencana anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terealisasi sebesar Rp. **27.231.297.839,00** atau 93,93 % dari anggaran yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tabel 3.33 didukung secara langsung oleh Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Perlindungan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja Tahun 2025

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis secara optimal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.34
Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	65,01	92,63	37,82
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan LPP	176,67		
3	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	95,77	96,88	Tidak ada
4	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	98,52	98,61	Tidak ada

3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Perwujudan akuntabilitas keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, selain tercermin dari realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran juga dapat dilihat melalui realisasi anggaran berdasarkan belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2025

No	Uraian Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	26.897.670.213	25.204.576.952	93,70
2.	Belanja Modal	2.092.196.500	2.026.720.887	96,87
	Jumlah	28.989.866.713	27.231.297.839	93,93

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2025, DPPKBP3A mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp. 2.092.196.500,00 telah dilaksanakan sebanyak 16 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp. 2.092.196.500,00, realisasi nilai kontrak sebesar Rp. 2.026.720.887,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 65.475.613,00 (3,12%).

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2025 DPPKBP3A telah melaksanakan sebanyak 117 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp. 7.669.950.297,00 realisasi pengadaan sebesar Rp. 7.222.345.887,00.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada kurun waktu tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan beberapa penghargaan, sebagai berikut:

“ Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025 Tingkat Nasional Kategori MADYA”



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, mengupas tentang pencapaian kinerja organisasi khususnya di tahun 2025.

Pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah DPPKBP3A berada pada level Baik, namun masih terdapat indikator-indikator kinerja tujuan/sasaran yang masih perlu ditingkatkan.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Progres penyelesaian isu-isu strategis tertuang pada capaian hasil indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Melalui proses yang dinamis, penguatan perencanaan, pelaksanaan program yang tepat sasaran disertai evaluasi yang akurat dalam penerapannya diharapkan terus berproses dan terus meningkatkan akuntabilitas yang telah dilaksanakan, dan semoga laporan ini dapat memberikan dampak terhadap hasil kinerja selanjutnya dan mampu mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Purwokerto, 31 Desember 2025
KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS

KRISianto, A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740321 199501 1 001